

PENGEMBANGAN MODEL BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN ETOS BELAJAR SISWA SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH PINGGIRAN PROVINSI DIY

Sugeng Bayu Wahyono, Deni Hardianto, dan Ariywan Agung
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: sugeng_bw@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model belajar untuk meningkatkan etos belajar siswa sekolah menengah di daerah pinggiran provinsi DIY. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang etos belajar siswa sekolah menengah di daerah pinggiran provinsi DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dengan langkah penelitian difokuskan pada dua tahap yaitu tahap *preliminary* dan tahap *formative evaluation*. Pada tahap *preliminary* akan dilakukan persiapan dan prosedur kerja penelitian, sedangkan tahap *formative evaluation* dilakukan *prototyping* (penyusunan model belajar) yang di *expert reviews, one-to-one* dan *small group*, serta *field test*. Uji coba model belajar dalam penelitian ini dilakukan di salah satu SD di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa model pembelajaran *centering the margine* memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan etos belajar siswa di daerah pinggiran.

Kata Kunci: *model belajar, etos belajar*

Abstrak

This study aims to develop a learning model to improve high school students learning ethos in the suburbs area of DIY Province. This research is a continuation from the previous study about high school students learning ethos in DIY province's suburb area. Research and Development model is used in this study, which focused on the preliminary and formative evaluation phase. Preparation and work procedure will be in the preliminary phase, and the formative evaluation conduct of prototyping (learning model design), which have been reviewed by expert, one-to-one and small group evaluation, and also field test. The learning model trial in this study, was held in one of the elementary school in Bantul. The result shows that the "centering the margine" learning model give a significant contribution in improving student learning ethos in the suburbs area.

Keywords: *models of learning, learning ethos*

PENDAHULUAN

Masyarakat marginal, secara sosiologis memiliki karakter yang khas berbeda dengan apa yang berkembang pada masyarakat pusat dan modern. Posisinya yang berada di pinggiran menciptakan ekologi sosiokultural yang berbeda dan sekaligus membentuk identitasnya. Perasaan sebagai orang pinggiran menciptakan moralitas khas seperti subsisten, kurang

visioner, pasrah, fatalistik, dan inferior. Oleh karena itu tidak mengherankan jika warga masyarakat pinggiran sering tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan gelombang modernisasi yang mengkonstruksi sistem sosial dan budayanya. Berbagai nilai yang menjadi rujukan aktivitas kehidupan sosialnya, terus mengalami gempuran nilai modernitas yang mengutamakan pertumbuhan dan efisiensi.

Dalam banyak kasus, masyarakat marginal kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan hadirnya nilai baru, sehingga mengalami keketatan budaya, dan bahkan terjadi inersia. Suatu kondisi gagap karena pandangan dunianya yang masih lama harus ditempatkan pada situasi modern.

Oleh karena karakternya yang khas tersebut maka perlu menjadi pertimbangan bagi sebuah perlakuan sosial budaya, termasuk dalam aktivitas belajarnya. Inferioritas yang masih menetap dalam sikap dan pandangan hidup warga masyarakat pinggiran misalnya, menjadi akar persoalan mengapa murid di daerah pinggiran kurang memiliki tradisi dialog, diskusi, dan adu argumen. Karena itu murid di daerah pinggiran senantiasa terlilit *problem* takut bertanya. Posisinya yang sering menjadi obyek ketika hadir pengetahuan baru melalui lembaga pendidikan, semakin menambah rendahnya kepercayaan diri, dan takut bertanya. Situasi psikologis seperti itu membuat kebanyakan murid di daerah pinggiran hanya menjadi penurut dan menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh guru.

Keadaan seperti itu semakin diperparah oleh intensif dan ekstensifnya penerapan model pembelajaran yang berpusat pada guru (*teachers centered*). Anak didik kita pun tiba-tiba menjadi penurut akibat cara mengajar guru yang memang menghendaki murid serba nurut. Ruang kelas bukan tempat pencerahan bagi murid, melainkan sering menjadi tempat di mana pemikiran kritis dikikis. Para siswa dan juga mahasiswa sering kali di-drill jadi mesin hafalan. Bukan diajari bagaimana berpikir logis, kritis, dan kreatif, melainkan diajari *membeo*.

Cara mengajar *membeo* secara tidak sengaja membentuk murid menjadi penurut, takut berpendapat lain dan serba instruktif. Jawaban selalu disalahkan, yang benar adalah selalu jawaban guru. Murid terlalu banyak dilarang atau diatur, harus begini

dan begitu. Akibatnya murid terkondisi serba instruktif, maka untuk membaca buku pun harus menunggu instruksi. Bahkan kebiasaan ini berlanjut hingga di perguruan tinggi. Mobilitas dalam mencari buku-buku sumber belajar menjadi rendah karena perilaku membaca masih harus menunggu perintah dosennya. Spontanitas, antusiasme, kreativitas dan imajinasi murid menjadi terpasung.

Pola penyampaian isi pelajaran dari guru yang dianggap serba tahu kepada murid yang dianggap tidak tahu apa-apa masih terasa sekali dalam proses belajar di sekolah-sekolah kita. Proses belajar semacam itu, sadar atau tidak mengubah pribadi-pribadi kreatif menjadi penurut, akibatnya murid kurang berani berpendapat lain daripada yang berkuasa, entah di sekolah, di lingkungan keluarga, dan akhirnya pada lingkungan kehidupan politik kemasyarakatan.

Situasi proses belajar semacam itu membuat sistem pendidikan tidak adaptif terhadap dinamika perubahan masyarakat, melainkan justru terlembagakan mendukung kondisi *status quo* dan konservatisme.

Mengapa pola pengajaran yang dikembangkan guru masih menggunakan pola komunikasi searah? Hal ini disebabkan antara lain tiadanya otonomi guru dalam mengembangkan kreativitas mengajar dan mendidik murid, sebagai akibat ketatnya birokrasi pendidikan dalam mengkooptasi guru.

Ilustrasi kian meluasnya campur tangan birokrasi pendidikan terhadap kewenangan guru, antara lain dapat dilihat dalam hal penentuan jenis buku bacaan murid, program kurikulum muatan lokal (mulok) yang belum dijiwai semangat desentralisasi, dan posisi guru yang senantiasa menjadi obyek sapi perahan yang mewujudkan dalam maraknya kasus pemotongan gaji.

Sudah menjadi rahasia umum jika guru SD tak kuasa menolak buku-buku

bacaan murid yang sudah didrop dari atasan. Guru tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan buku-buku bacaan apa yang cocok bagi anak didiknya. Semua sudah ditentukan dari atas, karena kawasan SD memang menjadi lahan subur untuk berdagang buku bagi kalangan penerbit yang tentu saja mesti menjalin hubungan “saling pengertian” dengan pihak yang memiliki otoritas di jajaran struktur birokrasi.

Guru juga boleh dikatakan tidak pernah dilibatkan dalam membuat soal-soal ebtanas, tes hasil belajar (THB), membuat instrumen evaluasi, dan pengadaan media pengajaran. Mengapa demikian? Karena aktivitas tersebut biasanya bersifat proyek yang tentu saja mempunyai nilai ekonomi. Sudah menjadi kebiasaan, kegiatan yang bersifat proyek akan banyak diakses oleh pihak yang berada di jajaran struktural birokrasi. Bahkan dalam penyelenggaraan seminar-seminar untuk memperoleh kredit poin kenaikan pangkat, terkesan “diperdagangkan” kepada guru-guru dengan *embel-embel* surat dari atasan yang berisi keharusan ikut. Selama ini jarang sekali seminar-seminar semacam itu diselenggarakan atas inisiatif guru-guru sendiri, karena kalau inisiatif datang dari bawah biasanya akan terbentur oleh masalah perizinan dari atasan (Wahyono, 1996:3)

Sudah disadari, guru menjadi penentu utama kunci keberhasilan pelaksanaan program mulok di SD maupun SMP. Namun sayangnya, program ini tidak disertai dengan pola fleksibilitas dan dijiwai semangat desentralisasi. Akibatnya, guru kurang terlibat dalam meramu bahan mulok sesuai kebutuhan sekolah, murid dan lingkungan sosialnya. Yang lebih banyak terlibat dalam hal ini justru personil yang berada di jajaran struktural. Mengapa demikian? Karena di samping masih berkembangnya budaya paternalistik dan sistem evaluasi oleh para pengawas atau birokrat yang tak sinkron, juga karena di balik itu ada motif ekonomi. Dengan alasan guru

masih rendah kualitas SDM-nya, birokrat biasanya mengambil keputusan untuk meramu sendiri kurikulum mulok.

Padahal tidak jarang guru-guru yang sebenarnya cukup potensial terlibat dalam kegiatan seperti itu. Namun mereka ini biasanya kurang diperhatikan, dan bahkan tidak jarang birokrat justru menilai negatif terhadap guru-guru yang kreatif.

Reformasi Sistem Pengajaran

Sistem pendidikan demikian mengandung beberapa sifat konvensional. *Pertama*, senantiasa berorientasi pada target, maka sesuatu yang melekat pada sistem pengajaran itu ialah sistem ujian. Pengajaran yang berorientasi pada ujian, membentuk saluran-saluran yang secara ketat mengarahkan dengan efektif substansi pelajaran kepada target lulus. Dengan kata lain, adanya latihan atau ujian semata-mata untuk menyiapkan anak didik menguasai pengetahuan siap pakai dalam ujian. Dengan demikian, pengajaran terbatas pada proses memorisasi saja, suatu proses yang artifisial, tidak ada kaitannya dengan pengetahuan yang relevan bagi kehidupan. Anak didik direduksi menjadi “mesin-mesin ingatan” dan sedikit diberi kesempatan berlatih berpikir kritis.

Kedua, yang terjadi tradisi kuat untuk menetapkan materi pelajaran yang standar. Sekali ditetapkan sukar diadakan penyesuaian dan perubahan, dengan *textbook* semakin dilembagakan dalam sekolah. Situasi pengajaran klasikal dan penjadwalan tetap tidak memberi kesempatan kepada otoaktivitas, inisiatif, dan imajinasi, baik dari guru maupun dari murid. Rutinisasi cara penyampaian bahan pelajaran menyebabkan pengajaran semakin bercap sekolah, dan akibatnya lepas pula dari realitas kehidupan sehari-hari.

Melihat tuntutan yang berkembang di masyarakat, agaknya sistem pengajaran konvensional yang masih bertahan dalam masyarakat marginal semacam itu sulit dipertahankan. Hasil-hasil dari proses

pengajaran yang demikian tidak pernah akan bisa berdaya bila dihadapkan pada situasi dan tantangan-tantangan baru yang tidak terduga sebelumnya. Maka jika dibiarkan terus berlanjut akan melahirkan suatu krisis yang muncul dalam bentuk ketidakberdayaan kita yang harus segera menghadapi tantangan global.

Oleh karena itu pengembangan model belajar inovatif dan memandirikan siswa perlu dikembangkan untuk mendorong murid di daerah pinggiran mengalami transformasi kultural ke arah yang lebih memberdayakan. Potensi yang sama dimiliki oleh murid daerah pinggiran, perlu dikembangkan dengan mengembangkan model pembelajaran yang memberdayakan, yaitu model pembelajaran *centering the margine*. Sebuah model pembelajaran yang bergerak dari pinggir ke tengah, yang mengubah cara pandang murid yang terbelenggu inferioritas ke arah cara berpikir demokratis, mandiri, dan egalitarian.

Di wilayah provinsi DIY, pergerakan positif menuju target MDGs ini juga terjadi, khususnya pada tingkat sekolah dasar, sedangkan pada tingkat SMP pergerakannya melambat. Kota Jogja dan Kabupaten Sleman APM mengalami kenaikan positif, sedangkan di kabupaten Bantul mengalami trend naik turun. Kondisi serupa juga terjadi untuk angka partisipasi murni tingkat SMP/MTS (13-15 tahun). Angka APM SMP mengalami peningkatan dengan trend fluktuatif. Upaya keras masih dibutuhkan untuk mencapai target 100% dari seluruh penduduk Indonesia bersekolah hingga jenjang SMP. Terlebih terkait partisipasi anak perempuan yang rasio partisipasinya lebih kecil dari anak laki-laki. Kondisi ini menunjukkan profil pendidikan di Indonesia, di mana makin tinggi jenjang pendidikan, makin rendah angka partisipasi perempuan.

Akan tetapi masalah mendasar yang perlu segera mendapat solusi adalah bagaimana target kuantitatif tersebut mampu

bergeser ke target kualitatif. Harus diakui bahwa secara kualitatif mutu pendidikan di Yogyakarta kurang merata, dan seperti halnya makin ke pinggiran makin rendah mutunya. Jadi berbagai lembaga pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK yang berkualitas lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan jauh lebih rendah kualitasnya.

Fenomena itu boleh jadi merupakan implikasi dari model kekuasaan Jawa. Sudah sejak lama pilihan paradigma pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan sentralistik yang sangat dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa. Model ini diterapkan secara efektif pada era kerajaan Mataram dengan kota Jogja sebagai pusat dan sekaligus titik pemusatan kekuasaan. Benedict Anderson (1972:234) menggambarkan kekuasaan Jawa seperti daya pancaran lampu pijar. Asumsinya adalah: 1) Raja dan Keraton merupakan sumber cahaya yang mengalir dan memancarkan kekuasaan sehingga dapat memangku jagad raya dan negara atau menjadi paku jagad semesta alam, 2) Kekuasaan raja Jawa seperti cahaya lampu pijar, makin dekat dengan bolamnya makin terang, makin jauh makin lemah cahayanya hingga makin redup dan hilang sinar-sinar yang berasal dari bolam sumbernya.

Dalam memberikan layanan publik pun juga menggunakan cara pandang yang sama dengan daerah pedesaan atau pinggiran dalam posisi yang dipandang oleh pusat. Oleh karena daerah pinggiran memang tidak perlu diperkuat, dan bahkan dibiarkan lemah, maka pemberian layanan fasilitas publik pun sekehendak pemerintah pusat. Akibatnya semua pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan pun mengikuti pola pancaran lampu pijar, makin jauh dari pusat makin minim dan jelek.

Tingkat kualitas pendidikan di DIY yang mengikuti pola konsentris tersebut juga tercermin dalam etos belajar siswa,

dalam arti semakin ke daerah pinggiran semakin rendah tingkat etos belajarnya. Minimnya fasilitas belajar, tidak meratanya sumber daya, dan makin rendahnya tingkat status sosial ekonomi warga masyarakat di daerah pinggiran, merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya etos belajar siswa. Sementara itu secara kultural, pandangan dunia warga masyarakat pinggiran terhadap dunia sekitarnya juga memberikan pengaruh signifikan terhadap makna bersekolah dan makna belajar. Selama ini telah berkembang persepsi bahwa untuk apa sekolah dan giat belajar, pada kenyataannya tidak mampu mengangkat status sosial. Mereka dengan menempuh pendidikan, tetap saja tidak keluar dari kondisi hidup yang terjerat kemiskinan. Warga daerah pinggiran, terutama di daerah pedesaan masih didominasi cara berpikir fatalistik, mereka miskin karena memang ditakdirkan menjadi orang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu mereka beranggapan, untuk apa giat belajar jika pada kenyataannya mereka tetap saja miskin. Kondisi hidup warga pinggiran yang miskin berhubungan dengan kemalasan belajar.

Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang menggunakan paradigma pembangunan yang dimulai dari pinggir. Sebuah paradigma yang menjadikan daerah pinggiran sebagai awal dari perubahan, dan kemudian bergerak ke pusat. Hortstmann dan Wadley (2006:vii) dalam kata pengantar buku *Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands* menjelaskan bahwa dinamika sosial yang terjadi di daerah pinggiran justru akan semakin menentukan kelangsungan negara-bangsa di masa depan. Dalam prinsip *centering the margin*, menjadikan daerah pinggiran sebagai titik awal perubahan bergerak secara dinamis ke arah pusat, sehingga titik kekuatan sebuah negara ada dalam bingkainya yang berwujud kuatnya pertahanan di daerah perbatasan baik secara sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan paradigma seperti itu maka pemerataan pendidikan akan bergerak pula dari kawasan pinggiran ke pusat, sehingga sekolah-sekolah bermutu akan banyak ditemui di daerah pedesaan. Konkretnya, nanti akan dijumpai SD atau SMA yang bermutu di daerah Minggir atau pun daerah Rongkop Gunung Kidul. Untuk itu semua pihak perlu memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada jajaran eksekutif untuk mencoba menerapkan model pelayanan pendidikan yang bergerak dari pinggir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Bayu Wahyono, dkk (2012) menunjukkan bahwa etos belajar di daerah pinggiran di provinsi DIY sedang cenderung rendah. Indikatornya adalah bahwa di kalangan siswa sekolah pinggiran ditandai rendahnya minat baca, kurang menyukai tantangan atau rendahnya watak kompetitif, rendahnya kemandirian, tanggung jawab belajar yang tidak tinggi.

Berangkat dari hasil penelitian tersebut, maka perlu ada upaya peningkatan etos belajar siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara merata khususnya di provinsi DIY. Model belajar untuk meningkatkan etos belajar menjadi penting untuk dikembangkan dengan harapan dapat digunakan sebagai menyusun kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat.

Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan model belajar untuk meningkatkan etos belajar siswa sekolah menengah di daerah pinggiran di provinsi DIY. Melalui serangkaian kegiatan penelitian, maka akan diperoleh model belajar yang dapat meningkatkan etos belajar di daerah pinggiran. Dengan pengembangan model belajar ini nantinya akan dapat dipakai untuk meningkatkan etos belajar di sekolah Provinsi DIY. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah 1) Karakter sosial budaya apa saja yang

menetap dan mempengaruhi corak belajarnya?, 2) Model pembelajaran apa yang mendominasi dalam proses belajar pada sekolah di daerah pinggiran?, 3) Bagaimana mengembangkan model belajar untuk meningkatkan etos belajar siswa sekolah menengah di daerah pinggiran provinsi DIY dengan tahap *Preliminary, Formative Evaluation dan uji coba model?*”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan tidaklah berbeda jauh dari penelitian pendekatan penelitian lainnya. Namun, pada penelitian pengembangan ini difokuskan pada 2 tahap yaitu tahap *preliminary* dan tahap *formative evaluation* (Tessmer, 1998:58) yang meliputi *self evaluation, prototyping (expert reviews dan one-to-one, dan small group)*, serta *field test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat marginal senantiasa memiliki karakter sosiologis yang biasanya lebih menunjukkan komunalisme. Solidaritas sosial terasa begitu kuat, dan kebersamaan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Karena itu dalam masyarakat marginal semangat berbagi masih terasa kuat, sebagai suatu kecenderungan alamiah karena secara individual mereka memang lemah. Melalui mekanisme pemeliharaan semangat kebersamaan itulah masyarakat marginal terus bertahan hidup menghadapi tantangan yang mengancam eksistensinya.

Akan tetapi jika parameternya dilihat dari perspektif modern, karakter semacam itu memiliki kelemahan, terutama ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hubungan-hubungan sosial makin renggang. Modernisasi yang merasuk terus menawarkan efisiensi dan kesadaran individual. Bahwa kompleksitas persoalan hidup tidak lagi bisa dihadapi oleh cara-cara lama yang mengandalkan kebersa-

maan. Modernisasi memaksa komunitas marginal mau tidak mau harus menghadapi persoalan hidup secara individual. Tidak kecuali dalam cara belajarnya, yang dahulu bisa dihadapi secara bersama-sama, dalam arti sama-sama belajar dengan prestasi setara sedang-sedang saja, atau *mediokre*, tetapi sekarang modernisasi mengajarkan belajar efisien, individual, dan mandiri dalam suasana kompetitif.

Karakter Utama Model Pembelajaran *Centering the Margine*

Tentu saja itu semua mengharuskan adanya transformasi kultur belajar di kalangan masyarakat marginal untuk beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Di sinilah yang menjadi titik pijak untuk mengembangkan model belajar bagi murid di daerah pinggiran dengan model pembelajaran *Centering The Margine*. Beberapa karakter utama model pembelajaran ini antara lain; (1) pembelajaran berpusat pada murid, (2) siswa diberi keleluasaan dalam mengkonstruksi dunia sosialnya, (3) guru adalah fasilitator dan dinamisator, (4) materi pembelajaran bersumber pada lingkungan sosial, budaya, dan alam.

Pendekatan

Untuk mengefektifkan model pembelajaran *centering the margine*, maka perlu pendekatan pembelajaran dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berorientasi pada prinsip perkembangan anak

Tidak ada pemaksaan terhadap murid dalam proses belajar, semuanya disesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri. Murid tidak boleh diberi materi pelajaran yang tidak sesuai dengan kapasitas dan potensi alamiahnya. Murid pada perkembangan tertentu tidak boleh diberi materi yang sebenarnya hanya kehendak orangtuanya. Misalnya murid diminta untuk menghafal beratus-ratus lembar materi, pemberian tugas belajar yang sarat beban, atau memaksa murid untuk bela-

jar sesuatu hanya karena pertimbangan gengsi atau pencitraan.

2. Belajar berorientasi pada kebutuhan murid yang sesuai dengan kondisi sosio-kulturalnya

Belajar adalah mengenalkan murid pada lingkungan sekitarnya dengan pemahaman dan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah. Bukan dengan cara-cara berlebihan dan berdasarkan keyakinan penuh takhayul. Belajar tidak boleh dengan memberikan sistem paket yang seringkali merupakan konstruksi pusat, dan karena itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Materi belajar pun perlu memenuhi standar kelayakan, dalam arti apa yang sekiranya cukup layak dilakukan di lingkungan sosio-kulturalnya. Dengan kata lain, pendekatan ini mencegah terjadinya proses belajar yang ahistoris.

3. Belajar sebagai arena bagi bermain murid sehingga terasa menyenangkan

Tidak ada lagi suasana belajar yang menakutkan atau membuat suasana penuh kepanikan. Ini hanya menjadikan murid sebagai penurut, tidak berani bertanya, dan karena itu gagal bersikap kritis. Pendekatan ini dilakukan untuk membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Salah satu prinsip utama yang perlu dilakukan adalah pengakuan bahwa murid adalah subyek aktif, dan karena itu harus diberi ruang untuk berekspresi sesuai dengan kehendaknya. Dengan pendekatan ini, maka murid akan terus terlibat dan mendapat peran aktif dalam proses belajarnya.

4. Belajar sesuai dengan tema yang sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga murid merasa familier dengan materi belajar

Pendekatan ini menganjurkan untuk menghindari munculnya perasaan murid yang keluar dari konteks kehidupannya sehari-hari. Adanya pemaksaan kehendak

dari kepentingan si perekayasa pendidikan, sehingga murid tidak merasa hadir dalam proses belajarnya itu sendiri. Ia merasa terasing dengan lingkungannya justru ketika belajar di sekolah. Karena itu pendekatan yang melebur dengan lingkungan sekitarnya ini akan membawa murid menjadi lebih senang, bergairah, dan merasa *at home* ketika terlibat dalam proses belajar. Di sinilah pembelajaran tematik menjadi sesuatu yang imperatif.

5. Belajar yang merangsang daya kreasi siswa dan inovatif sesuai dengan situasi lingkungan sekitar

Murid ketika terlibat dalam proses belajar tumbuh semangat untuk senantiasa ingin tahu, selalu bertanya, dan ingin sebuah jawaban. Karena itu tidak boleh ada sistem serba instruktif, serba komando, dan serba pengendalian. Murid perlu terus diberi kesempatan dan peluang untuk berkreasi sesuai dengan talentanya. Melalui penciptaan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan menantang, maka murid akan terinspirasi untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kapasitas intelektualnya.

Media Tepat Guna yang Menginspirasi

Pada prinsipnya, media pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran *centering the margine* adalah media pembelajaran tepat guna. Oleh karena itu beberapa prinsip pengembangan medianya mengikuti karakter sebagai berikut.

1. Media terlibat

Media pembelajaran tidak dirancang berdiri sendiri yang memisahkan antara murid dengan media pembelajaran itu sendiri. Karena itu dalam media terlibat prinsipnya bukan menggunakan determinisme media atau efek media, tetapi media itu sendiri dirancang menurut kehendak murid. Isi pesannya dirancang menurut konstruksi murid yang menafsir dan senantiasa menjadi subyek aktif dalam mengkonstruksi isi pesan media. Di sini media bukan sekadar memindahkan atau

menstransfer pesan, tetapi menyediakan peluang bagi murid untuk menafsir isi pesan media itu. Jadi media itu sendiri bukan berdiri sendiri dan terpisah, tetapi terlibat dalam proses pembentukan pengetahuan bagi murid dalam proses belajar tersebut.

2. Media yang menginspirasi

Media bukan sekadar mempengaruhi atau mengendalikan pikiran siswa, tetapi juga perlu menginspirasi murid untuk berpikir dan berkreasi. Karena itu media pembelajarannya perlu terus diperbarui baik desain, isi pesan, maupun penempatannya. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya, media terus dirancang secara kreatif dan cerdas untuk merangsang berpikir dan imajinasi murid. Melalui mekanisme belajar berkesinambungan, media terus disediakan untuk senantiasa mengkondisikan murid terus terdorong rasa ingin tahunya, sehingga terus menginspirasi murid.

3. Isi mendorong budaya baca

Isi medianya dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan minat baca. Perlu diberikan pemahaman pada murid terhadap media, bahwa pada prinsipnya media untuk dibaca, bukan ditonton. Selama ini terjadi kesalahan konsep bahwa media seperti peta misalnya, banyak yang memahami, konsepnya adalah untuk ditonton bukan dibaca. Demikian pula internet, konsepnya adalah ditonton, bukan dibaca. Karena itu media tidak merangsang minat baca, dan pemasangan peta di ruang-ruang kelas pun diletakkan secara salah, yaitu di atas di luar jangkauan mata murid untuk membacanya. Akibatnya terjadi kerugian belajar yang berlarut-larut, karena kesalahan konsep tersebut.

4. Jenis media tepat guna tersebut antara lain serial poster, foto serial, peta, gambar, wayang, boneka, dan alat peraga

yang bahannya dari lingkungan sekitar.

Tata Letak (*setting*) Pembelajaran Bersifat Dinamis

Untuk memberikan suasana yang menyenangkan dan terus menciptakan gairah belajar, model pembelajaran *centering the margine* merekomendasikan tata letak atau seting pembelajaran yang dinamis, dengan prinsip sebagai berikut. 1) Dibuat bervariasi dengan posisi guru tidak selalu di depan. Variasi tata letak ini bisa dilakukan dengan membuat formasi-formasi bangku sekolah yang dibuat secara melingkar, setengah lingkaran, atau berkelompok-kelompok. Posisi guru pun bisa berada di tengah, di pinggir, atau bergerak secara dinamis. Murid pun kemudian dapat saling berhadapan, dan kemudian terlibat dalam suasana diskusi kelas yang hidup dan bergairah. Tata letak ruang kelas format setengah lingkaran untuk membangun kepercayaan dan keberanian bertanya. Dengan tata letak seperti itu akan mengatasi masalah fundamental murid, yaitu ketidakberanian mengungkapkan pendapat, atau ketakutan untuk bertanya. 2) Tata letak ruang kelas format oval untuk membangun kesetaraan dan suasana dialogis. Dengan tata letak seperti ini posisi murid dapat saling berhadapan, dan setara. Ini penting untuk membangun keberanian adu argumen, adu pendapat, dan adu konsep tentang suatu topik diskusi. Melalui seting pembelajaran seperti itu, maka akan mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi pendidikan. Ini penting dilakukan untuk murid di daerah marginal, karena dengan begitu mereka akan tumbuh kepercayaan diri, dan mendapat apresiasi. Sikap seperti itu adalah modal yang sangat berharga bagi mereka untuk menatap masa depannya secara lebih optimis.

Evaluasi yang Otonom

Di tengah menguatnya arus desentralisasi pendidikan itu, pemerintah justru

masih mengeluarkan kebijakan sentralistik, seperti penyelenggaraan Ujian Nasional. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional di Indonesia masih belum menemukan bentuknya yang baku, masih terus dalam proses pencarian dan mengundang pro-kontra. Ujian nasional adalah contoh aktual betapa rumitnya persoalan di seputar mutu pendidikan di negeri ini. Putusan Makamah Agung yang menolak kasasi pemerintah soal gugatan ujian nasional pada akhir tahun 2009 merupakan indikator betapa kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan masih rentah.

Pemerintah telah menetapkan angka 5,26 sebagai standar kelulusan bagi siswa di tingkat sekolah dasar sampai SMA bagi setiap mata pelajaran yang ditetapkan sebagai mata ujian nasional. Tetapi model evaluasi ini masih mengundang pro-kontra, dan dipertanyakan kadar representativitasnya. Pernyataan mendasar pun kemudian mengiringi keraguan terhadap kadar representativitas Ujian Nasional sebagai alat seleksi. Ada beberapa argumen yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut.

Pertama, selama ini sudah berkali-kali muncul kasus manipulasi Ujian Nasional. Bukan saja para orangtua yang mengkondisikan terjadinya manipulasi angka Ujian Nasional, tetapi juga di kalangan guru dan sekolah. Ini dapat dimengerti karena konduite guru dan sekolah ditentukan pula oleh pencapaian murid dalam Ujian Nasional. Akibatnya, demi menjaga "nama baik" guru dan sekolah maka mereka pun melanggar etika profesi.

Secara sosiologis, dalam masyarakat kita masih belum berkembang suatu sistem apresiasi sosial yang proporsional dan adil dalam melihat karya kegiatan, karya cipta, dan karya peradaban. Masyarakat masih kurang menghargai yang rumit-rumit, kurang menghargai pekerja keras, tetapi lebih menghargai yang *entheng-entheng* dan verbalistik. Di samping itu, komunalisme

di mana relasi-relasi sosial masih bersifat emosional, sering disalahgunakan pada sesuatu yang seharusnya secara obyektif dan rasional. Bahkan kearifan lokal, seperti sikap *welas asih, ora tegelan*, masih dibawa-bawa masuk ke kawasan obyektif rasional, sehingga tidak profesional. Kaena itu ujian nasional pun harus dilakukan dua kali, karena *ndak mesake* masyarakat atau *ora tega*.

Kedua, menggunakan Ujian Nasional sebagai variabel utama untuk menyeleksi murid kurang adil dan kurang demokratis. Secara sosiologis kebijakan Ujian Nasional, yang paling dirugikan adalah anak dari kelas bawah, karena sudah kalah dalam seleksi sosial-ekonominya. Lebih dari itu Ujian Nasional hanyalah potret sesaat yang tidak menggambarkan kemampuan riil anak. Karena itu kurang adil kalau potret sesaat itu dijadikan sebagai pertarungan masa depan anak. Ujian Nasional mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah masih lebih memperhatikan hasil daripada sebuah proses.

Secara kultural masyarakat kita memang masih berorientasi hasil, dan kurang menghargai proses. Dalam mengevaluasi apa pun kurang memperhatikan proses suatu kegiatan, tetapi hanya dilihat dari hasilnya. "jangan meniru sesuatu dari jadinya....tapi tirulah suatu itu dari proses menjadinya". Prinsip ini belum dipakai dalam kegiatan evaluasi oleh masyarakat kita, termasuk dunia pendidikannya. Karena itu mentalitas *menerabas* masih berkembang subur, apa-apa ingin serba cepat dapat hasilnya dan cepat mapan.

Lantas bagaimana sistem seleksi yang ideal bagi murid baru? Barangkali menyerahkan otoritas pada masing-masing sekolah untuk menciptakan dan menyelenggarakan sistem seleksi, menarik untuk dipertimbangkan.

Di sini tiap-tiap sekolah diberi peluang membuat alat seleksi sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan, serta kurikulum muatan lokal yang menjadi cirri khas

sekolahan. Cara ini akan mengkondisikan berkembangnya kreativitas guru dan pluralism sekolah. Para guru akan tertantang untuk berkreasi dan bahkan berinovasi dalam hal pembuatan alat evaluasi yang standar. Tidak seperti yang terjadi selama ini, guru kurang otonom, karena segala program aktivitas proses belajar mengajar sudah dipatok dari atas, guru tinggal melaksanakan.

Satu sistem pendidikan nasional agaknya tidak harus ditafsirkan, apa-apa serba nasional. Seperti kurikulum harus bersifat nasional, dan satu sistem evaluasi pun harus bersifat nasional. Toh pada kenyataannya, penyeragaman alat evaluasi dalam wujud Ujian Nasional itu pun tidak menghasilkan mutu sekolah yang standar. Bahkan serba penyeragaman itu telah mengkondisikan penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, sehingga menghilangkan pluralisme sekolah yang mestinya harus tetap terjaga jika memang menghendaki lembaga sekolah sebagai medium sosialisasi keanekaragaman budaya bangsa. Kreativitas guru pun terpasung, sebab sentralisme pendidikan memang tidak mengandaikan *creator* dan *innovator*, yang diperlukan hanyalah pelaksana.

Sementara itu, dalam aspek teknis, penilaian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan dan perilaku anak dengan berbagai alat dan cara antara lain: 1) Observasi yaitu pengamatan terhadap aktivitas siswa untuk mengetahui detail perilaku murid, 2) Unjuk karya yaitu menilai hasil karya siswa dalam proses belajar dalam kegiatannya, 3) Unjuk kerja yaitu menilai dinamika kerja murid baik secara individual maupun tim *work*, 4) Penugasan yaitu penilaian setelah diberi tugas-tugas yang layak sesuai dengan ka-

pasitas siswa. Portofolio yaitu akumulasi data evaluasi yang dipakai menganalisis perkembangan murid berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Setelah melalui serangkaian prosedur pengembangan model belajar yang bertajuk *centering the margine*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Model Pembelajaran *Centering the Margine* meliputi modelnya itu sendiri, pendekatan, instrumen evaluasi, media pembelajaran, dan tata letak pembelajaran. Model ini pada prinsipnya mendorong transformasi pembelajaran dari yang bersifat *teachers centered* menuju ke karakter pembelajaran *student centered*. Posisi murid yang ditempatkan sebagai subyek aktif dalam proses pembelajaran terbukti mampu meningkatkan etos belajar siswa SD di daerah pinggiran. Model Pembelajaran *Centering the Margine* juga bisa diujicobakan pada sekolah pinggiran dalam skala lebih luas sebagai upaya meningkatkan etos belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. (1972). "The Idea of Power in Java," dalam *Cultures and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Horststmann, Alexander, dan Wadley, Reed L. (2006). *Centering the Margin: Agency and Narrative in Southeast Asian Borderlands*, New York: Berghahn Books.
- Tessmer, Martin. (1998). *Planning and Conducting Formative Evaluations*. Philadelphia: Kogan Page.
- Wahyono, Sugeng Bayu. (1996). *Patologi Birokrasi dan Profesionalisme Guru SD*. Tesis Sosiologi. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM.